



Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Analysis of the Effect of Economic Growth, Investment and Government Expenditure on Inequality in Regional Development of South Sulawesi Province

Kurniati Mansyur¹, Nursini², Hamrullah³

¹ Sarjana Departemen Ilmu
Ekonomi, Fakultas Ilmu Ekonomi
dan Bisnis, Universitas
Hasanuddin
Email:
kurniatimansyur2603@gmail.com

^{2,3} Departemen Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Hasanuddin

Keywords: Economic growth,
investment, government
spending, development
inequality

Kata kunci: Pertumbuhan
ekonomi, investasi, pengeluaran
pemerintah, ketimpangan
pembangunan

Abstract

The purpose of this study is to measure and analyze the effect of economic growth, investment and government spending on regional development inequality in South Sulawesi Province. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The findings of this study are that economic growth has a positive and insignificant effect on regional development inequality in South Sulawesi Province. Investment has a negative and significant impact on regional development inequality in South Sulawesi Province. Government spending can have a significant impact on the low inequality of regional development in South Sulawesi.

Abstrak

Penelitian ini adalah mengukur dan menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh yang bermakna dengan rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan.

PENDAHULUAN

Ketimpangan pada dasarnya menimbulkan suatu masalah pembangunan dalam suatu wilayah yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan

masyarakat yang berujung kemiskinan dalam wilayah tersebut. Adanya wilayah yang memiliki faktor-faktor produksi yang lebih dan posisi yang sangat strategis akan mendukung wilayah tersebut berproduksi lebih banyak dibanding wilayah lain. Hal ini akan mendorong wilayah tersebut akan banyak menyerap investasi di daerah tersebut.

Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan suatu keadaan dimana adanya perbedaan kondisi wilayah antara wilayah yang maju dan wilayah terbelakang. Terjadinya perbedaan ini dikarenakan daerah yang terbelakang belum mampu memaksimalkan potensi dalam daerah tersebut dan kurangnya sumber daya yang dimiliki sehingga terjadi jarak antara daerah yang maju dan terbelakang. Akibat dari perbedaan ini kemampuan suatu wilayah dalam mendorong proses pembangunan pastinya akan berbeda. Di satu sisi ada wilayah yang pembangunannya relatif lebih meningkat, di sisi lain ada wilayah yang pembangunannya relatif tetap pada suatu titik. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mendorong terciptanya kemiskinan di suatu wilayah akibat dari pembangunan yang semakin terpusat di suatu wilayah dan semakin banyaknya pembangunan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.

Ketimpangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan di suatu wilayah, yang diharapkan bisa mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan yang merata dan pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah suatu idealitas yang diharapkan oleh setiap wilayah untuk bisa bersaing dengan wilayah yang lainnya.

Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dalam 24 kabupaten/kota dengan tingkat pembangunan yang berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, hal ini dikarenakan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki perbedaan potensi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan kualitas teknologi yang dimiliki setiap kabupaten/kota. Perbedaan ini akan menyebabkan suatu wilayah ada yang akan tumbuh relatif cepat dan ada juga yang relatif lambat, inilah salah satu penyebab yang akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Pembangunan yang begitu cepat dan terpusat di kota akan berdampak pada terjadinya kecemburuan sosial antara satu wilayah dengan wilayah lain. Wilayah yang relatif maju didukung oleh adanya potensi yang ada dalam wilayah tersebut untuk bisa mengeksplorasi sumber daya yang ada. Dimisalkan bagi para investor yang ingin menanamkan modal di wilayah tersebut pastinya investor akan memberikan modal kepada wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang.

Pembangunan di suatu wilayah dikatakan berhasil apabila dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun pertumbuhan ekonomi tersebut

berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi berada di angka 7,07%, angka tersebut jauh di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,17%. Namun, dibalik tingginya pertumbuhan ekonomi, terdapat ketimpangan yang cenderung meningkat di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilihat dari indeks Williamson yang berguna untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan membandingkan antara PDRB perkapita dengan jumlah penduduk wilayah tersebut.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan data indeks Williamson dan Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dalam 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2010-2019 yang dapat dilihat melalui Tabel 1 di bawah.

Tabel 1. Indeks Williamson dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Indeks Williamson	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	0,70	8,19
2011	0,68	7,61
2012	0,68	8,37
2013	0,68	7,84
2014	0,60	7,57
2015	0,60	7,19
2016	0,66	7,41
2017	0,62	7,23
2018	0,70	7,07
2019	0,60	6,92

Sumber : Data Diolah dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (2020)

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2010-2019 sangat berfluktuasi, dari tabel 1., terlihat bahwa pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,61% menurun drastis dari tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2012 justru laju pertumbuhan kembali meningkat sebesar 8,37% dari tahun sebelumnya, kemudian laju pertumbuhan kembali melambat pada tahun 2013 sebesar 7,84%. Begitu pula pada tahun 2014-2015, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 7,41%, dan pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan, terlebih lagi pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melambat di tahun 2019, hanya bertumbuh sebesar 6,92%, yang merupakan angka terendah sedikitnya dalam satu dekade terakhir. Tapi kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibarengi dengan menurunnya Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks Williamson dari tahun 2010-2017 tergolong fluktuasi dikisaran 0,60-0,70. Sehingga dari data nilai indeks tersebut dapat diklasifikasikan dalam kriteria ketimpangan tinggi.

Syafrizal (2008) mengatakan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal yang sebaliknya juga berlaku, bilamana konsentrasi ekonomi suatu wilayah rendah maka akan mendorong terjadinya pengangguran dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga menyebabkan kemiskinan. Ketimpangan yang terjadi pada wilayah disebabkan oleh keberagaman faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu wilayah. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang, maka berkemungkinan besar ia akan memiliki pendapatan yang semakin besar. Apabila suatu wilayah memiliki ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan yang besar, maka akan menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas, dan kesenjangan sosial.

Ketimpangan pembangunan merupakan persoalan yang seringkali terjadi dalam suatu wilayah, sebab persoalan ini telah menjadi sebuah gejala ekonomi maupun sosial di hampir setiap wilayah sebab terjadinya ketimpangan merupakan efek dari pembangunan ekonomi. Pembangunan yang idealnya mendorong pertumbuhan dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata tetapi kenyataannya malah menimbulkan ketimpangan.

Ketimpangan wilayah dicirikan dengan adanya daerah yang lebih maju dan ada daerah yang terbelakang. Masalah ketimpangan menjadi persoalan besar dalam beberapa tahun belakangan ini yang disebabkan karena ada beberapa negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat tetapi ketimpangan antar wilayahnya semakin melebar, karena untuk proses pembangunan terdapat beberapa perbedaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh setiap wilayah, dimana ada wilayah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tetapi kurang dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Begitu pula sebaliknya ada wilayah yang kurang SDA, tetapi SDMnya melimpah atau banyak. Sehingga dengan adanya keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing wilayah menjadi lebih stabil. Inilah yang kemudian akan memicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dikarenakan wilayah tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.

Alokasi investasi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu mengakibatkan investasi menjadi tidak merata pada suatu wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan investor lebih memilih menanamkan modalnya di wilayah yang berfasilitas baik, struktur jalannya baik dan juga pendidikannya jauh lebih baik dari wilayah yang masih terbelakang. Hal yang demikian membuat wilayah tersebut lebih berpotensi untuk mendapatkan investor dan bahkan wilayah yang tidak mendapat penanaman modal akan tertinggal dari wilayah lain.

Jhingan (2014) menjelaskan terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah, dimana salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan suatu wilayah adalah investasi. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan

meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Sedangkan, wilayah terbelakang lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal. Kelangkaan modal ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Myrdal dalam Islami dan Nugroho (2018) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi. Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sunariyah (2014) investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Penanaman modal yang dilaksanakan dengan tepat dan dalam jangka waktu panjang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pembangunan baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi swasta mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut. Akan tetapi, menurut Myrdal dalam Jhingan (2014) mengungkapkan bahwa investasi akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi. Bahkan ada beberapa wilayah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai wilayah-wilayah yang mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan data investasi PMDN Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 melalui tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Investasi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Investasi			
	PMA (Juta US\$)		PMDN (Milyar Rp)	
	Jumlah proyek	Realisasi	Jumlah proyek	Realisasi
2010	33	441,80	23	3.212,3
2011	36	89,60	42	3.986,3
2012	29	582,60	34	3.318,9
2013	88	462,80	57	2.921,0
2014	58	280,90	48	4,949,8

2015	165	233,30	244	9,215,3
2016	309	372,50	365	3,334,6
2017	196	712,80	342	1.969,4
2018	191	617,20	318	3.275,9
2019	239	302,60	132	4.672,8
Total	1.344	4.096.10	1.505	40.856.30

Sumber : Badan Penanaman Modal Indonesia, 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa investasi PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2019, dari data tersebut terlihat bahwa investasi PMDN berfluktuasi, terkadang meningkat dan terkadang pula mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 jumlah PMDN mengalami penurunan yang sangat drastis. Terjadinya penurunan PMDN menandakan bahwa investasi yang kurang dapat menimbulkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain seperti yang dikatakan Myrdal (2014) dalam teorinya mengenai dampak balik yang diakibatkan oleh perpindahan modal dan motif laba yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terabaikan. Hal ini menandakan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap wilayah menyebabkan kelangkaan modal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan.

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terlihat bahwa mengalami tren naik, ini mengindikasikan bahwa meningkatnya peranan pemerintah dalam sektor ekonomi. Dumairy (2007) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Berikut ini akan disajikan data pengeluaran pemerintah wilayah Provinsi di Sulawesi Selatan tahun 2010-2019 yang dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 3. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Tahun	Pengeluaran	Perubahan	
	Pemerintah	RP	(%)
2010	13.991.292.077	-	-
2011	17.265.168.996	3.273.876.919	23,40
2012	18.513.978.056	1.248.809.060	7,23
2013	21.399.398.146	2.885.420.090	15,59
2014	23.085.955.316	1.686.557.170	7,88

Development Policy and Management Review (DPMR).

Mansyur, K. et al. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah...

2015	27.192.372.962	4.106.417.646	17,79
2016	34.177.482.130	6.985.109.168	25,69
2017	33.151.099.450	-1.026.382.680	-3,00
2018	33.686.416.961	535.317.511	1,61
2019	35.525.303.935	1.838.886.974	5,46
Rata-rata Peningkatan		2.108.084.327	14,39

Sumber: Sulsel Dalam Angka (diolah) (BPS, 2020)

Tabel 3 menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan selama tahun 2010-2019, dimana rata-rata peningkatan sebesar 14.39% dimana dalam 10 tahun terakhir tingkat pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun tapi hanya pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah menurun sebesar 3 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan program pemerintah khususnya di sektor kesehatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan teori dan fakta yang penulis ingin menjabarkan Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?, Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?, dan Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan?

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan nasional akan menentukan besarnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sering dijadikan patokan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Besarnya pendapatan perkapita sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, maka tingkat pertumbuhan penduduk meningkat, begitu juga sebaliknya. Untuk mempertahankan tingkat pendapatan perkapita atau tingkat kesejahteraan relatif, perlu dicapai tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Kuncoro, 2006).

Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2013).

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan atau dari ekonomi pertanian (tradisional) ke ekonomi industri (modern). Pada awal proses pembangunan ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Namun setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi atau akhir dari proses pembangunan ketimpangan yakni pada sektor industri sudah dapat menyerap sebagian tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, ketimpangan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi (Todaro, 2013).

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antardaerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Jurang pembangunan dapat mengecil kembali saat daerah yang kaya sudah semakin berkembang (Khusnah, 2015). Ketimpangan tersebut, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Hubungan antara Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan berpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini, menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar dibandingkan mempersempit ketimpangan regional (Jhingan, 2014).

Myrdal juga mengemukakan bahwa perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2014).

Investasi berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini digambarkan dengan semakin banyaknya investasi yang masuk kedalam suatu wilayah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan berakhir pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi semakin banyaknya investasi yang masuk ke suatu wilayah justru akan menyebabkan ketidakmerataan (Syafrizal, 2008).

Menurut Myrdal dalam Jhingan (2014) investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar.

Menurut teori Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat bahwa pengaruh investasi pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat disimpulkan yakni investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan atau penurunan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan

mengalami peningkatan atau penurunan, seiring dengan peningkatan atau penurunan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah (Todaro, 2000).

Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2006). Todaro (2000) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa "pembayaran transfer" dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan sebagainya.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan tergantung dari pada rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila porsi dana pengeluaran lebih

besar untuk belanja barang dan jasa daripada belanja pegawai maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan perbaikan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah (Dhyatmika, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu dari tujuan Desentralisasi adalah mengoreksi horizontal imbalance, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme block grant/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Dengan diberlakukannya desentralisasi maka daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan pengeluaran pemerintah daerah yang ada dalam APBD. Sesuai dengan peran pemerintah dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, peran distribusi, dan peran dinamisasi, maka pengeluaran pemerintah daerah harus dilandaskan pada peran-peran tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal (2008) bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala

kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berskala kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan Sucihati (2014) mengemukakan bahwa semakin besar rasio pengeluaran pemerintah yang ditujukan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berkorelasi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Studi Empiris

Kailei Wei (2007) meneliti hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di China dengan menggunakan Analisis Regresi dan Indeks Williamson. Penelitian tersebut membuktikan bahwa hubungan variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di China.

Sasa Abrodovic, dkk (2011) meneliti tentang hubungan pola pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah di 22 Negara OECD dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan Analisis Empiris. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap ketimpangan ekonomi.

Harun, dkk (2012) meneliti tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah 2007-2011. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Aulia Urrahman (2012) meneliti tentang analisis ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2006-2010. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah, Investasi tidak memiliki pengaruh signifikan, namun memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Sementara Aglomerasi memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2013) tentang ketimpangan wilayah Di Provinsi Kalimantan Barat suatu kajian terhadap hipotesis Kuznet. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan wilayah. Temuan lainnya membuktikan bahwa hipotesis Kuznet tentang pertumbuhan yang tinggi diiringi juga dengan ketimpangan yang tinggi antar wilayah ternyata tidak berlaku di Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ketimpangan wilayah berkurang demikian sebaliknya. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu untuk membangun daerah tetapi bukan syarat cukup. Karena ada faktor lain yang sangat penting yaitu bagaimana dengan pembangunan tersebut membuat masyarakat daerah menjadi jauh lebih sejahtera dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wijang Mahakso (2013) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi 2003-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi diperoleh Indeks Williamson berkisar antara 0,36 sampai 0,40 dengan rata-rata yang berarti bahwa ketimpangan yang terjadi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi termasuk kategori sedang. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dan bertanda negatif, Belanja modal dan angka partisipasi sekolah

berpengaruh dan bertanda positif terhadap ketimpangan, kemiskinan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan dan bertanda positif, panjang jalan berpengaruh dan bertanda negatif terhadap ketimpangan. Koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh R-square sebesar 0,9678 mengindikasikan bahwa variasi variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi periode 2003-2010 sebesar 96,78 persen, sisanya sebesar 3,22 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Rosmeli (2015) meneliti tentang dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Variabel yang digunakan adalah PMDN, PMA, dan tingkat tenaga kerja dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini adalah Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2000-2014 rata-rata sebesar 0,41 dan terus mengalami penurunan. Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PMDN tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dan mempunyai arah negatif, sedangkan PMA dan TK mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan mempunyai arah positif.

Berdasarkan penelitian Henny A.K Pangkiro, dkk (2016) tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jawaban sebagai turunnya angka disparitas ekonomi. Tingkat kemiskinan yang meningkat akan memperbesar angka disparitas ekonomi. Ini menjadi tugas pemerintah untuk memperhatikan sektor penyerap tenaga kerja sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Sucihati (2014) Pengaruh Kenaikan Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi, Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di daerah tersebut. Faktor inilah yang menjadi syarat penting untuk mengukur ketimpangan yang ada. Ketika Investasi meningkat maka diharapkan mampu mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil data sekunder, dimana dengan pendekatan ini penulis berusaha untuk memahami pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Studi ini menggunakan 2 metode pengumpulan data, yaitu:

1. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai literatur guna memperoleh peralatan dasar teori-teori seperti buku-buku, majalah-majalah, buletin-buletin serta bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapang objek (Field Research), yaitu pengamatan langsung pada Kantor Biro Pusat Statistik untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah, ketimpangan pembangunan, PDRB perkapita dan jumlah penduduk periode 2005-2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut merupakan data time series dari tahun 2005-2019. Data yang dikumpulkan berupa data pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah, ketimpangan pembangunan, PDRB perkapita dan jumlah penduduk.

Penelitian ini menggunakan Indeks Williamson metode analisis data. Metode ini merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antar wilayah. Williamson (1975) mengembangkan indeks ketimpangan wilayah yang diformulasikan sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

IW= Indeks ketimpangan Williamson Provinsi Sulawesi Selatan

Y_i = PDRB per kapita tahun 2005-2019 Kabupaten/kota ke-i

Y = Rata-rata PDRB perkapita tahun 2005-2019 Provinsi Sulawesi Selatan

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk provinsi i

Indeks ketimpangan Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika semua Y_i = Y maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan pembangunan antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 (nol)

menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar daerah di Sulawesi Selatan.

Adapun data yang digunakan dalam analisis ini adalah data PDRB atas dasar harga konstan serta data jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 20 Kabupaten dan 3 kota tahun 2005-2019, melalui data tersebut didapatkan PDRB per kapita kabupaten/kota tahun 2005-2019.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode empat pengujian asumsi klasik yaitu:

1. Uji normalitas, uji asumsi ini menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.
2. Uji multikolinieritas, pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang sangat kuat atau pasti, sehingga dalam pengujian asumsi multikolinieritas digunakan metode tolerance value atau nilai inflation factor (VIF).
3. Uji autokorelasi, pengujian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.
4. Uji heterokedastisitas, pengujian ini dilakukan untuk pengujian persamaan regresi berganda mengenai sama atau tidak sama varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homokedastisitas, dan jika variansnya tidak sama/berbeda disebut terjadi heterokedastisitas.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan analisis regresi linear berganda. Variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas (independent variable) terdiri dari pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel terikat (dependent variable) adalah ketimpangan pembangunan wilayah.

Ketimpangan Pembangunan antar wilayah di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi dan fungsinya ditunjukkan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots) \dots \dots \dots (1)$$

Berdasarkan fungsi pertama, dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linear sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

Y: Ketimpangan Pembangunan Wilayah

X₁: Pertumbuhan Ekonomi

X₂: Investasi

X₃: Pengeluaran Pemerintah

β₀: Nilai konstanta

β₁: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

β₂: Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

β₃: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

μ: Terms of Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi variabel penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti yakni pertumbuhan ekonomi, investasi (PMDN dan PMA), pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, periode pengamatannya adalah tahun 2005–2019. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, dimana data yang dikumpulkan dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan dapat disajikan pada tabel 4.1. yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. Data Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Investasi (Milyar Rp)	Pengeluaran Pemerintah (Rp)	IW (%)
2005	6,05	374	6.012.123.359	0,72
2006	6,72	686	9.468.473.294	0,77
2007	6,34	1100	11.533.519.470	0,73
2008	7,78	1.105,20	13.337.671.101	0,77
2009	6,23	1.137,80	13.527.997.909	0,69
2010	8,19	3.212,30	13.991.292.077	0,70
2011	7,61	3.986,30	17.265.168.996	0,68
2012	8,37	3.318,90	18.513.978.056	0,68
2013	7,84	2.921,00	21.399.398.146	0,68
2014	7,57	4.949,80	23.085.955.316	0,62

2015	7,19	9.215,30	27.192.372.962	0,68
2016	7,41	3.334,60	34.177.482.130	0,66
2017	7,23	1.969,40	33.151.099.450	0,62
2018	7,07	3.275,90	33.686.416.961	0,70
2019	6,92	4.672,80	35.525.303.935	0,60

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2021

Tabel 4. yakni deskripsi variabel penelitian yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dalam periode pengamatan yang terjadi pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, dimana rata rata pertahun pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 0,062 persen, dan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun sehingga mempengaruhi ketimpangan pembangunan, hal ini akan disajikan perubahan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan dalam periode 2005-2019 yang dapat ditunjukkan pada berikut :

Tabel 5. Perubahan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Kenaikan (Penurunan)	Ketimpangan Pembangunan Wilayah	Kenaikan (Penurunan)
2005	6,05	-	0,72	-
2006	6,72	0,67	0,77	0,05
2007	6,34	0,38	0,73	-0,04
2008	7,78	1,44	0,77	0,04
2009	6,23	-1,55	0,69	-0,08
2010	8,19	1,96	0,70	0,01
2011	7,61	-0,58	0,68	-0,02
2012	8,37	0,76	0,68	0,00
2013	7,84	-0,53	0,68	0,00
2014	7,57	-0,27	0,62	-0,06
2015	7,19	-0,38	0,68	0,06
2016	7,41	0,22	0,66	-0,02
2017	7,23	-0,18	0,62	-0,04
2018	7,07	-0,16	0,70	0,08
2019	6,92	-0,15	0,60	-0,1

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Tabel 5 yakni perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan dalam periode 2005-2019, dimana perubahan tertinggi pertumbuhan ekonomi ada pada tahun 2010 sebesar 1,96 persen, sedangkan perubahan tertinggi pada ketimpangan pembangunan wilayah ada pada tahun 2018 sebesar 0.08 persen. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan selama 15 tahun terakhir akan dapat menyebabkan rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kemudian akan disajikan pertumbuhan investasi PMDN di Sulawesi Selatan periode 2005–2019 yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Pertumbuhan Investasi PMDN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019

Tahun	Investasi PMDN (Milyar Rp)	Kenaikan (Penurunan)
2005	374,00	-
2006	686,00	312
2007	1.100,00	414
2008	1.105,20	5,2
2009	1.137,80	32,6
2010	3.212,30	2.074,5
2011	3.986,30	774
2012	3.318,90	667,4
2013	2.921,00	-397,9
2014	4.949,80	2.028,8
2015	9.215,30	4.295,5
2016	3.334,60	-5.880,7
2017	1.969,40	-1.3652
2018	3.275,90	1.306,5
2019	4.672,80	1.396,9

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Tabel 6. menunjukkan pertumbuhan investasi PMDN yang terjadi di Sulawesi Selatan dimana tingkat pertumbuhan investasi tertinggi ada pada tahun 2015 sebesar 4.295,5. Sehingga dengan adanya tingkat investasi di Sulawesi Selatan akan mempengaruhi rendahnya ketimpangan pembangunan. Sedangkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan tahun 2005-2019 yang dapat ditunjukkan pada tabel 7 yaitu sebagai berikut :

Tabel 7. Pertumbuhan Tingkat Pengeluaran Pemerintah Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005–2019

Tahun	Pengeluaran	Perubahan	
	Pemerintah	RP	(%)
2005	6.012.123.359	-	-
2006	9.468.473.294	3.456.349.935	57,49
2007	11.533.519.470	2.065.046.176	21,81
2008	13.337.671.101	1.804.151.631	15,64
2009	13.527.997.909	190.326.808	1,43
2010	13.991.292.077	463.294.168	3,42
2011	17.265.168.996	3.273.876.919	23,40
2012	18.513.978.056	1.248.809.060	7,23
2013	21.399.398.146	2.885.420.090	15,59
2014	23.085.955.316	1.686.557.170	7,88
2015	27.192.372.962	4.106.417.646	17,79
2016	34.177.482.130	6.985.109.168	25,69
2017	33.151.099.450	-1.026.382.680	-3,00
2018	33.686.416.961	535.317.511	1,61
2019	35.525.303.935	1.838.886.974	5,46
Rata Rata peningkatan		2.108.084.327	14,39

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Tabel 7 yakni perubahan pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan selama tahun 2005–2019, dimana rata-rata peningkatan sebesar 14.39 persen, dimana dalam 15 tahun terakhir bahwa tingkat pengeluaran pemerintah meningkat dari tahun ke tahun, hanya dalam tahun 2017 pengeluaran pemerintah yang menurun sebesar 3 persen.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing masing variabel penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan pembangunan wilayah dari 15 tahun terakhir yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 23 maka akan dapat disajikan statistik deskriptif yang dapat ditunjukkan pada tabel 8 yaitu :

Tabel 8. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan ekonomi	15	6,05	8,37	7,23	0,69
Investasi	15	374,00	9.215,30	3.017,29	2.244,36
Pengeluaran Pemerintah	15	6.012.123.359	35.523.303.935	20.791.216.877	9.879.442.582
Ketimpangan Pembangunan	15	0,60	0,77	0,68	0,06

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Tabel 8 yakni statistik deskriptif dari masing masing variabel penelitian ini dimana nilai rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi dari 15 tahun terakhir yang diamati yakni sebesar 7,23 persen dengan nilai standar deviasi sebesar 0.69 persen dan pertumbuhan ekonomi yang terendah sebesar 6.05 persen dan nilai tertinggi adalah 8.37 persen. Kemudian nilai rata-rata (mean) tingkat investasi yang diukur dengan PMNDN di Sulawesi Selatan dari 15 tahun terakhir yang diamati sebesar Rp. 3.017.29 milyar dengan standar deviasi Rp. 2.244.36 milyar, sedangkan tingkat investasi yang terendah adalah Rp. 374 milyar dan tertinggi sebesar Rp. 9.215.30 milyar

Kemudian statistik deskriptif untuk pengeluaran pemerintah yang memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 20.791,216,877 dengan nilai simpangan baku yakni sebesar Rp. 9.879.442.582. Sedangkan nilai pengeluaran pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terendah dalam 15 tahun terakhir sebesar Rp. 6.012.123.359 dan yang tertinggi sebesar Rp. 35.525.303.935.

Selanjutnya untuk ketimpangan pembangunan wilayah selama periode 2005-2019, dimana rata-rata pertahun ketimpangan pembangunan sebesar 0,67%, sedangkan untuk tingkat ketimpangan pembangunan yang tertinggi sebesar 0,77%, dan yang terendah sebesar 0,60%.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa alat uji regresi berganda sudah tepat digunakan atau tidak sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistik regresi linear berganda dapat dipergunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan 4 pengujian yakni uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, serta uji autokorelasi, yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Salah satu cara yang dilakukan dalam

mendeteksi data yang normal adalah dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 9. Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03039412
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.086
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil olahan data, 2021

Tabel 9 yakni hasil uji normalitas dengan menggunakan *one sampel Kolmogorov smirnov test* maka diperoleh nilai sig = 0,200 > 0,05 berarti dapatlah disimpulkan bahwa data yang akan digunakan dalam pengujian regresi memiliki distribusi yang normal, alasannya karena memiliki nilai sig > 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Colineritas Statistik</i>		VIF	Keputusan
	<i>Tolerance</i>	VIF	Standar	
Pertumbuhan Ekonomi	0.878	1.139	10	Tidak ada gejala multikolinieritas
Investasi	0.649	1.541	10	Tidak ada gejala multikolinieritas
Pengeluaran Pemerintah	0.704	1.421	10	Tidak ada gejala multikolinieritas

Sumber: Hasil olahan data, 2021

Berdasarkan Tabel 10 yakni hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 (*Tolerance* > 0,10) yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95 persen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen pun yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 (*VIF* < 10). Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi memiliki ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini dengan nilai standar. Jika signifikan < 0,05 maka disimpulkan model regresi mengandung adanya heteroskedastisitas, jika sebaliknya nilai signifikansi > 0,05 maka terjadi homokedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Hasil Uji Heterokedastisitas

No.	Variabel	Sig	Keterangan
1.	Pertumbuhan ekonomi	0.558	Tidak ada heterokedastisitas
2.	Investasi	0.491	Tidak ada heterokedastisitas
3.	Pengeluaran pemerintah	0.197	Tidak ada heterokedastisitas

Sumber : Lampiran SPSS 23

Dari tabel hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* maka dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak ada masalah heterokedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- Bila DW lebih besar daripada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

- d) Bila DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan data mengenai hasil uji autokorelasi yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 12. Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson	Nilai dL	Nilai dU
.842	.709	.629	2.771	0,814	1,750

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS release 24 maka diperoleh nilai DW sebesar 2,771, sedangkan dari tabel DW dengan tingkat signifikan 0,05 dan jumlah data (n) = 15 serta K = 3, diperoleh nilai dL sebesar 0,814 dan dU = 1,750, karena nilai dU = 1,750 < 2.771 < 2,250 (4 - 1,750) berarti data regresi tidak memiliki autokorelasi.

Analisis Regresi dan Korelasi Berganda

Hasil regresi analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2005-2019 dapat dilihat melalui tabel 13 berikut :

Tabel 13. Hasil Olahan Data Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.697	.099		7.030	.000
Pertumbuhan ekonomi	.011	.014	.133	.765	.460
Investasi	-1.378E-05	.000	-.549	-2.719	.020
Pengeluaran Pemerintah	-2.544E-12	.000	-.446	-2.301	.042

a. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan

Sumber: Hasil olahan data SPSS

Berdasarkan Tabel 13 hasil olahan data regresi, maka selanjutnya hasil persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 0,697 + 0,011X_1 + (-1.378E-05)X_2 + (-2.544E-12)X_3$$

Untuk lebih jelasnya hasil persamaan regresi dapat diberikan penjelasan regresi sebagai berikut :

Development Policy and Management Review (DPMR).

Mansyur, K. et al. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah...

1. Konstan (b_0) sebesar 0,697 menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah konstan maka ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,697.
2. Koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi (b_1) adalah signifikan sebesar 0,011. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Koefisien regresi untuk variabel investasi (b_2) adalah sebesar $-1.378E-05$. Ini berarti bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pemerintah (b_3) adalah sebesar $-2.544E-12$ ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5.

Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi

Uji korelasi dan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (variabel bebas) secara serentak terhadap variabel dependen (variabel terikat). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat dilihat melalui Model summary berikut ini :

Tabel 14. Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.842 ^a	.709	.629	.03429	2.771

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah , Pertumbuhan ekonomi , Investasi

b. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 14, maka diperoleh nilai $R=0,842$, hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terdapat hubungan kuat terhadap ketimpangan pembangunan sebab nilai korelasi memiliki arah positif dan mendekati 1. Kemudian untuk mengetahui variasi persentase pengaruh variabel lain terhadap ketimpangan pembangunan maka dapat dilihat dari nilai R square yakni sebesar 0,709, hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah) mampu menjelaskan sebesar 70.90 persen variasi variabel ketimpangan pembangunan.

Sedangkan sisanya sebesar 29.10 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas dengan nilai standar. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai standar (0,05) berarti memberikan pengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil olahan data yakni hasil pengujian parsial maka dapat disajikan uraian berikut ini :

a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat Ketimpangan Pembangunan

Hasil uji parsial untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 0,358, karena nilai sig. lebih besar dari nilai standar (0,460 > 0,05), berarti pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Variabel Investasi dengan tingkat Ketimpangan Pembangunan

Hasil uji parsial untuk investasi sebesar 0,020, karena nilai sig. lebih kecil dari nilai standar (0,020 < 0,05), berarti investasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Variabel Pengeluaran Pemerintah dengan tingkat Ketimpangan Pembangunan

Hasil uji parsial untuk pengeluaran pemerintah sebesar 0,038, karena nilai sig. lebih kecil dari nilai standar (0,042 < 0,05), berarti pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji serempak (uji F) bertujuan untuk mengukur pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah dalam kaitannya dengan ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2005-2019, yakni dengan cara membandingkan antara nilai signifikan dengan nilai standar, apabila nilai signifikan lebih kecil dari nilai standar berarti memberikan pengaruh secara serempak atau bersama-sama. Hasil pengujian secara serempak dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 15. Hasil Uji Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.031	3	.010	8.921	.003 ^b
Residual	.013	11	.001		
Total	.044	14			

a. Dependent Variable: Ketimpangan Pembangunan

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah , Pertumbuhan ekonomi , Investasi

Sumber : Lampiran SPSS

Berdasarkan hasil pengujian secara serempak dengan menggunakan uji F maka diperoleh nilai sig = 0,003 < 0,05 (nilai standar). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh secara serempak atau bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2005-2019. Model asumsi dinyatakan layak.

Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2005-2019. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pembahasan dari setiap variabel yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi linear berganda maka diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh temuan-temuan pertumbuhan ekonomi berfluktuasi dimana rata-rata peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,062 persen. Ini berarti bahwa dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan selama 15 tahun terakhir maka akan dapat menyebabkan rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2013) bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya, ketimpangan akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kailei Wei (2007) hasil temuan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah.

Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda maka diperoleh hasil bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Sulawesi Selatan. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh temuan bahwa tingkat pertumbuhan investasi tertinggi ada pada tahun 2015 sebesar 4.295,5. Sehingga dengan adanya tingkat investasi di Sulawesi Selatan akan

mempengaruhi rendahnya ketimpangan pembangunan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jhingan (2014) bahwa investasi cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Selain itu Investasi khususnya investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini, kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perbedaan inilah yang akan menyebabkan ketimpangan antar wilayah menjadi semakin lebar. Penelitian Sucihati (2014) menemukan bahwa kenaikan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucihati (2014).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Dari hasil analisis persamaan regresi maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana temuan-temuan yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah di Sulawesi Selatan selama tahun 2005–2019 sebesar 14.39 persen, dimana dalam 15 tahun terakhir bahwa tingkat pengeluaran pemerintah baik di sektor kesehatan maupun di sektor Pendidikan meningkat dari tahun ke tahun hanya dalam tahun 2017 pengeluaran pemerintah yang menurun sebesar 3 persen hal ini disebabkan karena adanya penurunan program pemerintah di sektor kesehatan khususnya di Sulawesi Selatan.

Sjafrizal (2008) mengemukakan bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. maka dalam upaya penyelesaian masalah ketimpangan tersebut diperlukan pengeluaran pemerintah daerah yang sudah terkoordinir yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berskala kecil. Hasil penelitian yang dilakukan Sucihati (2014) mengemukakan bahwa semakin besar rasio pengeluaran pemerintah yang ditujukan langsung kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan perkapita yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berkorelasi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini

Development Policy and Management Review (DPMR).

Mansyur, K. et al. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah...

mengindikasikan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tidak dapat memberikan pengaruh yang bermakna terhadap rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah.

Pengaruh investasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan, yang temuan penelitian ini bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan, temuan ini mengindikasikan adanya investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2005–2019 dapat mempengaruhi rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan tahun 2005–2019 mempunyai pengaruh positif dan signifikan, secara empiris menemukan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka akan mempengaruhi rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah. Sehingga dapat diindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh yang bermakna dengan rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Anwar, A. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Bogor: P4W.
- Aritonang, I. 2010. Menilai Status Gizi untuk Mencapai Sehat Optimal. Yogyakarta: Leutika.
- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Realisasi Investasi PMDN. 2016.
- Badan Pusat Statistik Sulsel, Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka. 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Dalam Angka 2012-2016 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha. BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar
- Badan Pusat Statistik. 2017. Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Boediono. 1998. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Dumairy. 2007. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Dyhatmika, Wahyu Ketut. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

- Harun, Lukman & Maski, Ghozali. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Malang. (Jurnal).
- Hyman, David N. 1992. Public Finance. Dryden Press, London.
- Islami, Sari Fitrah dan Nugroho SBM. 2018. Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 33 No. 1.
- Jhingan, M.L. 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers: Jakarta.
- Kailei Wei, Shujie Yao and Aying Liu (2007). Foreign direct investment and regional inequality in China. The University of Nottingham, Tahun 2007. No. 32.
- Khusnah, Lailatul. 2015. Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13.
- Kompasiana, 2015. Jumlah Si Miskin (5): Garis Kemiskinan Bank Dunia. 2 Desember 2015. www.kompasiana.com
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga: Jakarta.
- Kurniasih, Erni Panca. 2013. Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian Terhadap Hipotesis Kuznest. Universitas Tanjungpura Pontianak. (jurnal).
- Mahakso, Wijang. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Diprovinsi Jambi 2003-2010. Universitas Gadjah Mada. (Tesis).
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Makro Ekonomi. Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Muhammed, A. 2014. Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.9.
- Pangkiro, Henny A.K, dkk. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. (jurnal).
- Pramono, Riska Ayu. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau. Universitas Gadjah Mada. (Tesis).
- Rosmeli. 2015. Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Jurnal Paradigma Ekonomika, Universitas Jambi, Vol. 10, No 2.
- Rustiadi, Eman, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R. Panuju. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Cetakan Ketiga. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saša Obradović, Nemanja Lojanica, Olivera Janković, 2011. The Influence of economic growth on regional disparities: Empirical evidence from OECD Countries. 2016 vol. 34 no. 1 161-186

Development Policy and Management Review (DPMR).

Mansyur, K. et al. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah...

- Sucihati, Heny. 2014. Pengaruh Kenaikan Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kalimantan Barat. Jurnal Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2008. Teori Pengantar Makroekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. 2014. Pengantar Pasar Modal. Edisi Keenam. Yogyakarta: YKPN.
- Syafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori & Aplikasi. Padang: Baduose Media.
- Tambunan, T.T.H. 2003. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama. Yogyakarta: Kanisius.
- Tarigan, R. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Revisi. Penerbit: PT. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2013. Pembangunan Ekonomi. Edisi Keseblasan. Jakarta: Erlangga.
- Tukiyat. 2002. Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah. Pengantar Pengembangan Ekonomi Wilayah. Jakarta: BPPT.
- Urrahman, Aulia. 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2006-2010. Jurnal.
- Williamson, Oliver E. 1975. Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications. New York : The Free Press.